

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepala Daerah adalah penguasa atas Pengelola Keuangan pada suatu Daerah dimana kepala daerah tersebut memiliki tugas untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan. Kepala daerah dalam menjalankan wewenangnya dibantu oleh pejabat perangkat.

Pejabat Perangkat Daerah tersebut yaitu SEKDA, kepala SKPKD selaku PPKD dan kepala SKPD selaku PA. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait Pengelolaan Keuangan di SKPD dibantu oleh KPA, PPK-SKPD, PPTK dan Bendahara. Supaya Pengelolaan Keuangan pada SKPD lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam Pengelolaan Keuangan pada suatu daerah atau instansi dibutuhkan struktur yang menjadi pedoman dalam keberhasilan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan tersebut.

Prosedur Penatausahaan Keuangan pada SKPD diolah oleh dua Bendahara yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dan dibantu juga dengan bendahara pembantu yang bertanggungjawab atas Penerimaan dan Pengeluaran yang ada pada SKPD. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu Untuk kelancaran dalam

Pengelolaan Keuangan terkait pengeluaran Daerah dalam aktivitas pada SKPD, maka ditunjuknya bendahara pengeluaran untuk melakukan Penatausahaan Pengeluaran di SKPD.

Dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Dibendahara Pengeluaran maka diperlukan Prosedur Penatausahaan Keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah. Supaya tidak adanya penyimpangan dalam penatausahaan keuangan, serta dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam kegiatan Penatausahaan Keuangan dan serta mencegah terjadinya kerugian-kerugian yang berdampak kepada Keuangan Negara akibat kelalaian seseorang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba mempelajari tentang Prosedur Penatausahaan Dibendahara Pengeluaran dengan melakukan Magang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai pemahaman teori. Oleh karena itu disini Penulis akan mengangkat judul terkait **“PROSEDUR PENATAUSAHAN DI BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diuraikan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu Bagaimana Prosedur Penatausahaan Di Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penulisan

Praktek kerja ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Penatausahaan Di Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat penulisan

Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah :

1.4.1 Bagi Penyusun

Bertujuan agar penulis dapat memperluas pengetahuan yang lebih luas tentang Prosedur Penatausahaan Di Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

1.4.2 Bagi Instansi

- a. Mendapatkan kreatifitas dari mahasiswa magang.
- b. Mahasiswa dapat membantu instansi dalam menyelesaikan tugas.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Tempat magang yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.65A, Jati, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Selama minimal 40 hari kerja.

1.6 Metode Pengumpulan data

1.6.1 Studi Perpustakaan

Dengan mendatangi perpustakaan penulis dapat mencari, mengumpulkan, dan mempelajari buku terkait dengan bahan-bahan yang berhubungan dengan Tugas Akhir penulis.

1.6.2 Studi Lapangan

Peninjauan langsung dengan mendatangi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik melalui observasi lapangan maupun wawancara.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Teori pendukung yang digunakan dalam penjelasan dan pembahasan tentang Prosedur Penatausahaan Di Bendahara Pengeluaran.

Bab III : Gambaran Umum Instansi

Berdasarkan gambaran umum instansi maka akan tentang Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Visi dan Misi instansi, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Bab IV : Pembahasan

Pada Bab ini berisikan mengenai laporan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan selama magang terkait “Prosedur Penatausahaan Di Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat”.

Bab V : Penutup

Membahas tentang kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan magang di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.